

Presiden RI Era Pax Consortis G-20

Christianto Wibisono



Momentum pilpres 2009 bersamaan dengan terjadinya transformasi geopolitik akibat tsunami keuangan global mengisyaratkan perubahan mendasar struktur kekuatan dunia. Superpower AS telah berkurang “tenaga dalam”-nya, dan era hegemoni Pax Americana berakhir. Dunia tidak bisa dikelola secara unilateral lagi oleh AS melainkan

memerlukan suatu Pax Consortis, konsorsium kekuatan-kekuatan yang setara dalam mengelola tata ekonomi global yang lebih mencerminkan “power equation” abad 21.

Dalam konteks ini selaku anggota G20 kita ikut memegang peran dalam perombakan struktur IMF termasuk mengubah mekanisme kebijakan arus bantuan IMF. Paradigma baru ini harus dipahami elite Indonesia supaya tidak ketinggalan za-

man dengan sikap apriori anti IMF. Sebab kita sebagai anggota G20 mirip di zaman dulu De Heeren Seventien, dewan pemegang saham yang mengarahkan kebijakan VOC. Jadi kita jangan termengong dengan perubahan mendasar paradigma global era G20, di mana kita jadi salah satu penentu sehingga mental "korban" harus diganti dengan mental "pengarah"

Dalam konteks ini maka pidato retorika, agitasi para capres yang ketinggalan zaman untuk masih meng*go to hell* kan IMF sebetulnya tidak valid dan malah merugikan Indonesia. Karena kita malah berutang dengan menjual obligasi dikenakan suku bunga tinggi 11,75% padahal Mexico memperoleh Flexible Credit Line (FCL) US\$ 40 milyar dalam tempo 2 jam dengan interest jauh lebih rendah.

Capres 2009-2014 akan menjadi presiden Indonesia yang mempunyai peluang turut mengubah struktur Bank Dunia IMF yang menurut jadwal harus selesai dirombak paling lambat akhir 2011. Jika Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014 tidak mempunyai kapabilitas dan pengenalan geopolitik dan geo-

ekonomi yang mutakhir, relevant dan valid serta masih berorientasi masa lalu yang ketinggalan zaman maka Indonesia tidak akan memperoleh manfaat apapun dari posisi uniknya sebagai anggota G20. Apalagi jika figure presiden maupun wapresnya adalah orang yang masih menyisakan rekam jejak masa lalu berkaitan dengan pelanggaran HAM berat dan belum tuntas diadili serta seolah menikmati impunitas. Presiden Indonesia yang hanya berkobar agitasi anti ini anti itu, tapi tidak menyadari datangnya era Pax Consortis, era di mana RI bisa menjadi salah 1 dari 20 kekuatan geopolitik terpenting dunia menentukan arah kebijakan ekonomi global, tentu akan mubazir bagi Indonesia. Dan kita akan kehilangan momentum sebagai salah satu arsitek Tata Ekonomi Global Baru. Melihat kepada rekam jejak dan "supply" para kandidat maka Susilo Bambang Yudhoyono jelas merupakan yang paling tepat mengendalikan bahtera kapal Republik Indonesia memasuki samudra globalisasi abad 21 dalam armada Pax Consortis, menggantikan Pax Americana. Kita, ikut sebagai task force pimpinan, penentu dan pengarah Tata Ekonomi Dunia baru. Mudah mudahan bangsa Indonesia tidak salah pilih

hanya tergodanya oleh pidato agitator yang menggebu-gebu tapi tidak memahami transformasi geopolitik yang sangat mendasar. Dunia perlu elite yang menghargai dan menghormati diversitas dan berkompetisi secara sehat, tanpa perlu berkonflik dan berkonfrontasi. Kalau hanya sekedar agitasi xenophobia dan mengumbar angin surga, menyalahkan lawan politik maka sebetulnya elite kita itu hanya jago kandang yang hanya bisa saling "peras" antara Senayan dan Merdeka Utara. Tapi tidak mampu menggerakkan Indonesia Inc yang diberi anugerah Tuhan menjadi salah satu dari 20 penentu kebijakan ekonomi global secara optimal demi peningkatan harkat martabat kita.

KTT G 20 London 2 April 2009 ditutup tanpa walk out oleh Presiden Sarkozy dan menjanjikan stimulus global US\$ 1,1 triliun di samping gabungan stimulus masing-masing negara yang total akan menggelontorkan dana US\$ 5 triliun selama dua tahun. PM Gordon Brown dalam jumpa pers menyatakan bahwa ia sudah mengusahakan reformasi Tata Keuangan Global sejak 10 tahun, tapi baru dalam 6 bulan ini memperoleh momentum berupa urgensi keadaan darurat, tsunami ke-

uangan global. Presiden Obama berhasil menghindari cercaan status AS sebagai pesakitan, biang keladi krisis yang mirip epidemi virus beracun. Tidak perlu menyalahkan sebab yang penting adalah pemulihan kondisi ekonomi global yang mirip pasien pembekuan pembuluh darah jantung, karena penyumbatan arus transaksi keuangan global akibat hilangnya kepercayaan kepada sesama banker.

Komunike 19 halaman itu memang sangat rinci untuk putusan suatu KTT kepala Negara dan pemerintah. Kompromi tentang otoritas supranasional pengawas dan penegak hukum terhadap bisnis sektor keuangan, meningkatkan lembaga Financial Stability Forum (FSF) menjadi Financial Stability Board (FSB) tertuang dalam Deklarasi Strengthening the Financial System. FSB bekerjasama dengan IMF harus memberi deteksi dini mirip alat deteksi tsunami. FSB akan memantau ketat "suaka pajak" (Tax havens) yang merupakan penampung dana korupsi, KKN dan dana ilegal lain. FSB akan melaporkan hasil kerjanya pada KTT di Scotland bulan November 2009.

Mengenai perombakan struktur Bank

Dunia dan IMF KTT mengacu pada jadwal yang telah disepakati pada pertemuan tehnik tentang perombakan struktur dan quota anggota yang lebih mencerminkan posisi 2010 ketimbang warisan 1945 ketika baru lahir selesai Perang Dunia II. Reformasi IMF sesuai kesepakatan April 2009 akan diselesaikan review quotanya pada Januari 2011. Sedang mengenai reformasi Bank Dunia yang disepakati Oktober 2008 akan dipercepat prosesnya dan direview pada Spring Meeting April 2010.

Karena struktur quota belum dirubah, maka China hanya bersedia menyeter US\$ 40 milyar untuk peningkatan modal IMF yang dilipat tiga menjadi US\$ 750 milyar. AS, Uni Eropa dan Jepang bersedia iuran masing-masing US\$ 100 milyar, Sementara pertanyaan wartawan dalam jumpa pers tentang berapa iuran Saudi Arabia dan Negara petrodollar, belum bisa dijawab oleh Gordon Brown.

Paul Krugman menulis kolom The New York Times 2 April menyatakan bahwa China harus menanggung resiko sikap keras kepala karena tidak mau me-revaluasi Yuan. Sekarang China mengalami resiko kemerosotan nilai dollar AS secara riil. Menu-

rut Krugman bila China melakukan revaluasi maka eksporinya memang menurun, dan pendapatan dollar juga menurun. Tapi sekarang dengan kebanyakan dollar, tapi nilainya merosot, maka hasilnya sama saja bagi China. AS tidak akan bisa lepas dari ketergantungan menjual terus surat utangnya dan China harus terus membeli, sebab bila tidak maka inflasi akan terus menggerus assets yang dimiliki China dalam bentuk T bills.

Masalah nilai mata uang dan asset yang dikuasai suatu Negara dalam system keuangan global yang saling terkait memang kompleks dan diluar kendali Negara berdaulat serta otoritas nasional yang terbatas dalam yurisdiksi domestic. Sementara transaksi berlangsung lintas batas, lintas Negara, lintas benua dalam multi currency yang semua dispekulasikan, di hedge dan di-futures trading-kan secara sangat abstrak dan canggih.

Hampir seluruh negara, terutama Negara-negara Dunia Ketiga memiliki kekayaan pihak non Negara yang jumlahnya fantastis dan melebihi assets pemerintah. Di Negara dengan system demokrasi liberal dan transparan maka masyarakat lebih berani berkonfrontasi dengan birokrasi dan

mempertahankan hak milik property rights sebagai bagian dari HAM yang esensial. Di Negara berkembang, orang kaya dan pengusaha identik dengan orang yang patut dicurigai dan diawasi. Memang ada juga koruptor yang terbongkar seperti alm H Thahir selaku Asisten Dirut Pertamina yang menyimpan harta karun korupsi ratusan juta dollar dan terbongkar karena sengketa warisan antara janda muda dengan keluarga dari istri pertama.

Suaka pajak (tax havens) dikenal secara internasional dan universal di mana elite dari suatu Negara menyimpan harta yang patut dicurigai sebagai hasil korupsi, di rekening bank yang aman di Negara yang membuka fasilitas tax haven (suaka pajak). Negara dengan system otoriter seperti Uni Soviet juga memerlukan lembaga keuangan internasional yang seolah independent dari rezim komunis di Moskow, agar dapat bertransaksi bisnis untuk kepentingan Uni Soviet secara lincah.

Tahun 1957 Uni Soviet mendirikan Moscow Narodny Bank di London untuk memfasilitasi keperluan transaksi devisa, impor ekspor Uni Soviet dengan Negara Negara Barat

karena Uni Soviet menganut rezim control devisa yang ketat.

Tahun 1968 Singapura membuka fasilitas rekening Asian Dollar bagi para nasabah bukan warga Singapura untuk menyimpan deposito dollar di Singapura, bebas pajak.

Berhubung mata uang yang dipakai kemudian beraneka ragam maka istilahnya diganti menjadi ACU Asian Currency Unit.

Pada tahun 1976 setelah H Thahir meninggal, maka janda muda istri kedua, Kartika mencairkan deposito di Chase Manhattan Bank New York dan Hongkong Shanghai Banking Corp (HSBC) Singapura. Ketika akan mencairkan deposito bernilai US\$ 35 juta di Sumitomo Bank, Kartika berkonflik dengan putra H Thahir dari istri pertama. Akibat konflik yang mencuat di pengadilan dan terungkap di media massa maka Pertamina turun tangan mengklaim uang itu sebagai hasil komisi yang bernuansa korupsi dan patut dikembalikan kepada Pertamina. Melalui procedure hokum perdata yang sangat rumit diperlukan 17 tahun untuk menuntaskan perkara ini. Itupun setelah LB Moerdani yang menjabat

Menteri Pertahanan bersedia muncul di kursi saksi dengan bukti bahwa uang itu adalah komisi dari kontraktor Siemens kepada Thahir. Pada 3 Desember 1992 Hakim Lai Kew Chai memutuskan mengembalikan uang itu kepada Pertamina. Kartika naik banding dan baru pada 25 Agustus 1994 deposito bunga berbunga yang mencapai nilai US\$ 81 juta itu kembali ke Pertamina. 18 Tahun dan biayanya mungkin bisa mencapai 10% atau US\$ 8 juta untuk proses litigasi yang melibatkan pengacara tingkat Queen Counsel dalam system peradilan Inggris.

Pada bulan Juni 1991 konsultan AT Kearney mengumumkan hasil survey senior staf Lapuz bahwa dana ACU yang berasal dari Indonesia mencapai 41% dari total assets ACU Singapura. Berdasarkan extrapolasi data statistic resmi Monetary Authority of Singapore tentang assets ACU maka pada 1991 diperkirakan dana milik warga Negara Indonesia yang diparkir di rekening ACU Singapura mencapai US\$ 20 milyar.

Karena expose itu maka nama saya dicoret langsung oleh Presiden Soeharto dari daftar caleg pemilu 1992 dari partai Golkar walaupun sudah

sempat masuk daftar nomor jadi dari dapil Jawa Tengah. Mendagri Soepardjo Rustam bahkan sempat khawatir bahwa saya akan ditangkap oleh aparat. Tapi setelah saya menjelaskan langsung kepada Mensesneg Moerdiono barulah dipahami duduk perkaranya.

Menurut PDBI, ada 3 kategori pemarkir dana. Pertama ialah kategori koruptor model H Thahir. Kedua pengusaha yang memerlukan transaksi valas cepat, mudah dan efisien. Ketiga, para professional, ibu rumah tangga dan keluarga kelas menengah yang menyimpan untuk tunjangan hari tua, beasiswa sekolah anak-anak di luar negeri dan mencari suka dari pajak, pungli maupun devaluasi yang sudah merupakan tradisi klasik di Indonesia.

Dua presiden Indonesia sama-sama punya rekor mendevaluasi matauang rupiah, sehingga masyarakat yang canggih merasa perlu mengamankan asset dan harta yang diperoleh dari keringat ke valuta asing dollar.

Pada kepresidenan Bung Karno, 1945-1966 Rupiah mengalami gejolak luarbiasa dengan 3 kali tindakan moneter. Pertama, gunting Syafrudin 20

Maret 1950, uang kertas yang beredar digunting dan nilainya turun separoh. Kedua, pada 24 Agustus 1959 uang kertas Rp. 10.000 bergambar gajah dan nilai Rp. 5.000 bergambar macan, "ditembak mati" dihapus dua nolnya menjadi Rp. 100 dan Rp. 50. Benar benar dua kali "perampokan" oleh Negara terhadap harta milik rakyatnya sendiri. Pada 13 Desember 1965, kabinet menteri Bung Karno menetapkan Rp. 1.000 uang lama akan ditukar hanya dengan Rp. 1 uang baru. Harga bensin yang tadinya Rp. 250/l langsung naik jadi Rp. 1000/l. Inflasi melonjak 660%, ekonomi terpuruk dan Soeharto melengserkan secara Bung Karno secara merayap.

Soeharto melakukan 4 x devaluasi selama 32 tahun rezim Orde Baru. Pertama, devaluasi 10% pada 1971 dari 1 US\$ = Rp. 378 menjadi Rp. 415. Kemudian 15 Nov 1978 devaluasi 50,6% dari Rp. 415, menjadi Rp. 625. Frekuensi semakin kerap, 30 Maret 1983 rupiah di devaluasi lagi 38% dari Rp. 702 ke Rp. 970. Devaluasi keempat 21% pada 12 Sep 1986

Dari Rp. 1.354 ke Rp. 16.44 per 1 US\$. Soeharto kapok dan malu maka Menkeu Kabinet Pembangunan V di-

wanti-wanti boleh melakukan gebrakan apa saja asal bukan devaluasi.

Karena sebagai "raja" Soeharto malu menjilat lidah setiap kali pidato kenegaraan dan APBN menyatakan tidak akan ada devaluasi tapi selalu masih terjadi. Karena itu pada 1987 ketika terjadi kerawanan, Menkeu Sumarlin hanya melakukan gebrakan politik uang ketat, dengan suku bunga termahal dan tertinggi di dunia pada 1988. Selama 10 tahun nilai rupiah terus melemah dan ketika krismon Asia mulai merebak di Thailand, kurs Rupiah sudah sekitar Rp. 2.250 atau turun 36,8% dari devaluasi 12 Sep 1986.

Ketika IMF memberi resep fatal yang sekarang bisa dikategorikan dan diakui sebagai malpraktek oleh Joseph Stiglitz ekonomi Bank Dunia peraih Nobel, maka teknokrat IMF itu mungkin tidak pernah belajar bahwa rakyat Indonesia sudah 7 kali di devaluasi dan tingkat kepercayaan public trust sangat rendah. Gebrakan menutup 16 bank adalah blunder besar IMF. Soeharto juga sudah kebingungan sehingga membiarkan kurs mengambang terus dan tidak dipegang. Seandainya bulan September 1997 rupiah didevaluasi langsung ke

Rp.5,000 per 1 US\$ barangkali tidak akan terpuruh sampai di atas Rp. 15,000. Soeharto jatuh dan foto Michael Camdessus "sedakep" menyaksikan Soeharto menandatangani MOU merupakan vonis hilangnya wangsit sang raja Jawa yang formal baru akan mundur 21 Mei 1998.

Pasca krismon, orang mulai berkontemplasi tentang resep IMF yang kemudian diakui keliru bahkan oleh ekonomi peraih Hadiah Nobel, Joseph Stiglitz dapat dikategorikan sebagai suatu "malpraktek" oleh dokter yang salah memberi resep kepada pasien sehingga pasien kolapse. Karena itu di kalangan elite Indonesia timbul antipati, dan apriori menolak IMF tanpa mempedulikan bahwa IMF sudah di metamorphose sesuai dengan perubahan geopolitik 2008. Sejak krismon Asia 1998 Gordon Brown yang waktu itu menjabat Menteri Keuangan Inggris sudah mengumandangkan perlunya suatu New International Financial Architecture, menggantikan arsitektur lama warisan Perang Dunia II. Tapi waktu itu AS masih merasa superpower terkuat dan tidak berminat melakukan perubahan yang akan mengurangi porsi quotanya sebagai pemegang saham dan voting power terbe-

sar di Bank Dunia/IMF, sekitar 17%.

Perkembangan satu dasawarsa terakhir menempatkan RRT sebagai kreditor dan banker terbesar bagi AS yang menjadi debitor terbesar dalam sejarah umat manusia. Itulah sebabnya muncul joke bahwa krismon dunia bisa diselesaikan oleh G2, AS dan RRT jika mereka duduk berdua memutuskan soal utang piutang mereka. Realitanya, setelah pudarnya Pax Americana, dunia tidak mungkin lagi didominasi oleh satu kekuatan hegemonic bahkan sekelas AS. Karena redup dan pudarnya kekuatan AS, maka dunia memasuki era multipolar, divergensi, diferensiasi, diversifikasi kekuatan yang tidak didominasi secara unilateral oleh Negara manapun. Inilah yang disebut Pax Consortia, konsorsium kekuatan dunia yang setara berbagi kuasa dan tanggung jawab untuk mengarahkan kebijakan Tata Ekonomi Global secara bijaksana dan mengandung bobot implikasi yang realistis.

G20 adalah pemegang saham super mayoritas dalam struktur keuangan global. Indonesia duduk sebagai salah satu anggota sehingga menjadi penentu arah program Bank Dunia/IMF. Karena itu elite Indonesia ha-

rus mengubah mental masih merasa jadi "victim" dan pasien yang trauma dengan dokter IMF, menjadi "pemilik dan atasan" sang dokter yang te-

lah insaf dari salah resep tahun 1998. dan sekarang menyadari fungsi dan lebih professional dalam mengatasi tsunami global. □

